



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020. Hal ini dimaksud bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat dalam periode RPJMN tahun 2020 - 2024. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNNP Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Secara umum BNNP Sumatera Barat berupaya keras untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba dan pemberantasan yang bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya.

Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2021 sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai Kinerja BNNP Sumatera Barat secara keseluruhan.

Demikian, semoga Allah SWT meridhoi usaha kita semua. Amin

Padang, 28 Januari 2022
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat

Drs. KHASRIL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
- b. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Program Kegiatan tersebut di implementasikan melalui 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat dikelompoknya sebagai berikut:

1. Capaian sesuai target sebanyak 8 indikator kinerja kegiatan
2. Capaian melebihi target sebanyak 5 indikator kinerja kegiatan
3. Capaian di bawah target sebanyak 4 indikator kinerja kegiatan

Berdasarkan uraian capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, menggambarkan bahwa BNNP Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dalam pengembangan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaannya, BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Selain itu dukungan dan peran serta masyarakat juga sangat berperan dalam pencapaian kinerja di BNN Provinsi Sumatera Barat.

Capaian kinerja ini tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pagu anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah sebesar **Rp. 14.449.818.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 14.132.476.464,-** atau sebesar **97,80 %** dari total anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Analisis Capaian Sasaran.....	15
B. Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP	48

Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat TA 2021.....	12
Tabel 2	Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2021.....	15
Tabel 3	Sebaran Kegiatan Diseminasi di BNNP Sumatera Barat Tahun 2021	19
Tabel 4	Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2021	20
Tabel 5	Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Lingkungan BNNP Sumatera Barat	22
Tabel 6	Rekapitulasi Kemandirian Partisipasi di Lingkungan BNNP Sumatera Barat	25
Tabel 7	Kawasan/ Wilayah Rawan Narkoba yang Diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	27
Tabel 8	Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih BNNP dan BNNKab/Kota	29
Tabel 9	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	32
Tabel 10	Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 11	Hasil Survey Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya	35
Tabel 12	Jumlah Tahanan Masuk dan Tahanan Keluar pada Proses Penyidikan TA 2021.....	38
Tabel 13	Jumlah Barang Bukti Narkotika pada Proses Penyidikan 2021	40
Tabel 14	Jumlah Barang Bukti Non Narkotika pada Proses Penyidikan 2021	40
Tabel 15	Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2021 ..	45
Tabel 16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat dan BNNKab/kota Tahun 2021	47
Tabel 17	Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2021	48
Tabel 18	Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2021 Berdasarkan Sumber Dana	48

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat**
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BNN Kota Payakumbuh**
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BNN Kota Sawahlunto**
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Solok**
- Lampiran 5 Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Pasaman Barat**

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berkembang begitu pesat dan sangat mengkhawatirkan merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), suatu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan terus berkembang serta menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, keamanan dan mengakibatkan hilangnya satu generasi di masa depan. Peredaran Narkoba saat ini sudah merambah ke seluruh wilayah dan berbagai lapisan masyarakat yang mana sasaran dari peredaran narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam tetapi juga ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kos dan bahkan lingkungan rumah tangga.

Permasalahan ini memerlukan penanganan yang serius dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menanggulangi permasalahan narkoba tersebut, BNNP Sumatera Barat melakukan berbagai upaya melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Selain itu juga diperlukan komitmen bersama para aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara dan seluruh komponen masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Keadaan Geografis

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o 54' Lintang Utara dan 3o 30' Lintang Selatan dan antara 98o 36' - 101o 53' Bujur Timur. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau

Sumatera dan mempunyai luas wilayah sekitar 42,01 ribu Km² . Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km² atau sekitar 14,31 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km² (0,05%). Provinsi Sumatera Barat memiliki 218 pulau yang tersebar di 7 Kabupaten/ Kota yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (113 pulau), Kab. Pesisir Selatan (48 pulau), Kab. Padang Pariaman (1 pulau), Kab. Agam (2 pulau), Kab. Pasaman Barat (26 pulau), Kota Padang (21 pulau), Kota Pariaman (4 pulau) dan yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (3 pulau).

Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang, kapal tradisional, atau speedboat, para pengedar narkoba beraksi di perairan Indonesia. Narkoba masuk ke Provinsi Sumbar (85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat perbatasan-perbatasan. Di provinsi Sumatera Barat narkoba masuk melalui sepanjang daerah pesisir pantai (tiku, pariaman, padang, painan, kambang dan kepulauan mentawai).

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN Provinsi Sumatera Barat masih sangat kurang. Jumlah keseluruhan personil pada BNN Provinsi Sumatera Barat ASN 10 orang, Polri 10 orang, PPNNP 28 orang. Berdasarkan ketentuan Daftar Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 211 Orang.

Kebijakan yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam menangani permasalahan narkoba yaitu penanganan secara seimbang, terintegrasi dan komprehensif antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Implementasi dari kebijakan tersebut yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan P4GN secara masif ke semua lini seperti dilingkungan instansi pemerintah, swasta, pendidikan, pelaku usaha dan seluruh komponen masyarakat. BNNP Sumatera Barat juga berupaya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika ke seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program P4GN melalui konsep pembangunan berwawasan anti narkoba, menumbuhkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam program P4GN dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan anti narkoba menjadi pelaku P4GN secara mandiri, melakukan rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta menangkap para pelaku kejahatan narkotika yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat tanpa pandang bulu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala BNNP Sumatera Barat kepada Kepala BNN dan para pemangku kepentingan lainnya atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran 2021.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi. BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas Pokok

BNNP Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya di sebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

4. Kewenangan

Kewenangan BNNP secara umum secara implisit terlihat pada tugasnya. Namun, kewenangan yang dikhususkan undang-undang adalah tugas

dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Rehabilitasi
- e. Bidang Pemberantasan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT



6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran Umum

B. Dasar Hukum

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja

B. Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Analisis Capaian Sasaran

B. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran

Dokumen Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sumatera Barat juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Sumatera Barat sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
2. Memperkuat kerja sama dengan stakeholder terkait P4GN
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi relawan narkoba, penggiat anti narkoba, Agen Pemulihan sebagai perpanjangan tangan BNN Provinsi Sumatera Barat
4. Pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai wadah pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba
5. Meningkatkan Informasi dan Layanan Publik
6. Menambahkan Jumlah Sumber Daya Manusia

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2021. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera

Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kab/kota	Rp. 590.396.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	Rp. 258.035.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota	Rp. 1.031.569.000
4.	Penyelenggaraan	Meningkatnya upaya pemulihan	Jumlah kawasan rawan di	2 Kawasan	Rp.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Pemberdayaan Alternatif	kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”		163.979.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,52	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	28 Orang	Rp. 219.405.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	8 Unit	Rp. 523.112.000
			Indeks kepuasan	3,2	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			layanan klinik rehabilitasi BNNP		
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1 Peta jaringan	Rp. 200.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas	Rp. 1.182.061.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Rp. 302.435.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			narkotika yang P-21*)		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	92	Rp. 137.460.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	94	Rp. 3.927.022.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai.

BNN sebagai instansi vertikal dari BNN memiliki visi, misi dan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Visi : “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong- royong”.

- Misi : 1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Professional
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan Narkotika
3. Mengembangkan dan memperkuar kapasitas kelembagaan

Adapun tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.

Upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditetapkan perjanjian kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen dan kesepakatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Lembaga/instansi. Adapun Perjanjian BNNP Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,52
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	28 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	8 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	17 Berkas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat	92
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 Kabupaten/kota
13	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provisis Sumatera Barat	94
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, BNNP Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Perjanjian kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2021 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 18 (delapan belas) indikator. Disamping itu BNNP Sumatera Barat juga melakukan berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di wilayah Sumatera Barat.

Tabel 2.
Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	100
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	50
3	Meningkatnya kesadaran dan	Jumlah kabupaten/kota	4	4	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan	2 Kawasan	100
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,52	2,52	100
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	28 Orang	33 Orang	118
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	12 Orang	240
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	-		
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	8 Unit	8 Unit	100
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat	3,2	3,2	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	200
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	17 Berkas	29 Berkas	171
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-		
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-	-	
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat	92	87,25	95
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja	4 Kabupaten/ kota	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		Anggaran mencapai target			
13	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provisi Sumatera Barat	94	97,91	104
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/ kota	3 Kabupaten/ Kota	75

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada BNNP Sumatera Barat dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Tingkat capaian kinerja BNNP Sumatera Barat selama tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam bentuk tabel dan narasi.

1.	Sasaran : Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100

Definisi operasional dari Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah Jumlah kabupaten/kota yang remajanya

memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba yang mencapai nilai 51.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai capaian tersebut adalah dengan melakukan pengisian kuisioner Dektari dan didukung dengan kegiatan Informasi dan Edukasi melalui media elektronik (media online, radio) dan non elektronik (media cetak, insert konsten, media luar ruang dan pelatihan soft skill, dan Kampanye/Pergerakan Seni). Sebaran informasi P4GN yang dilaksanakan BNN Provinsi Sumbar di tahun 2021 mencapai 130 kegiatan.

Tabel 3.
Sebaran Kegiatan Diseminasi Informasi BNNP Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Kegiatan	BNNP Sumbar	BNNK Payakumbuh	BNNK Sawahlunto	BNNK Solok	BNNK Pasaman Barat	Jumlah
1	Diseminasi Informasi Melalui Talkshow		2			1	3
2	Diseminasi Informasi P4GN Melalui Kampanye/Pagelaran Seni	1			1		3
3	Diseminasi Informasi P4GN Melalui Insert Konten	9	1		5	3	11
4	Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak		3	2		1	6
5	Diseminasi Informasi Melalui Media Luar Ruang	8	6	6	20	2	39
6	Diseminasi Informasi Melalui Placement Radio Lokal		3	10		1	14
7	Diseminasi Informasi Melalui Media Online	4	3			41	48
8	Diseminasi Informasi Melalui Branding				1		1
		22	18	18	27	49	
	Total						130

Tabel 4.
Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2021

No.	Unit Vertikal	Nilai Dektari	Kategori
1	BNNP Sumatera Barat	50,27	Tinggi
2	BNN Kota Payakumbuh	53,74	Sangat Tinggi
3	BNN Kota Sawahlunto	52,68	Tinggi
4	BNN Kabupaten Solok	45,43	Sangat Rendah
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	53,81	Sangat Tinggi
DEKTARI PROV. SUMATERA BARAT		51,19	Tinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan penyuluhan/ sosialisasi oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2021 adalah 51,02 (Kategori Tinggi) dengan target angka 51 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi hasil capaian sebagai berikut:

- 1) Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$)
- 2) Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
- 3) Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
- 4) Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$)

Berdasarkan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi BNNP Sumatera Barat diperoleh Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahguna Narkoba **51, 19 (Kategori Tinggi)**. Artinya, Kemampuan Remaja Sumatera Barat untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba tinggi.

Dari penghitungan di atas, dapat dilihat BNNP Sumatera Barat bahwa Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tercapai 3 kabupaten/kota Hal ini dapat disimpulkan bahwa target capaian BNNP Sumatera Barat pada indikator tersebut adalah 100%.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan diantaranya:

1. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi
2. Tingginya antusiasme dari remaja yang mengikuti kegiatan penyuluhan / sosialisasi mengenai bahaya Narkoba
3. Terbentuknya Duta SINAR (Generasi Anti Narkoba) di Kota Payakumbuh
4. Responden dapat mengisi kuis sesuai petunjuk yang diberikan saat kegiatan sosialisasi/ penyuluhan.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah Target pengisian kuis 100 orang, sementara kegiatan pelatihan soft skill hanya untuk 15 orang. sehingga tidak sesuai antara ketersediaan anggaran dengan target yang diminta.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah kerjasama dengan media tidak saja dalam hal penempatan konten, tetapi juga dalam pembuatan konten-konten yang kreatif yang dapat menarik selain itu adanya bimbingan lebih lanjut dalam pengisian kuis terhadap remaja. Kemudian untuk memenuhi target pengisian Deklarasi 100 orang pada Tahun 2021 diperoleh dari kegiatan penyuluhan Non DIPA.

Sebagai rekomendasi kedepan kegiatan pelatihan soft skill dapat mengakomodir minimal 100 orang peserta untuk pengisian kuis Deklarasi.

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2021 dalam upaya meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya :

1. Kerjasama dengan media tidak saja dalam hal penempatan konten, tetapi juga dalam pembuatan konten-konten yang kreatif, sarat makna dan disesuaikan dengan kearifan lokal;
2. Melakukan pelayanan publik keliling ;
3. Pelaksanaan lomba kreatif tingkat sekolah menengah;
4. Pencapaian target 100 orang remaja yang mengisi kuis Deklarasi diantisipasi melalui kegiatan penyuluhan NON DIPA.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota	50

Definisi operasional dari Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah Jumlah kabupaten/kota yang keluarganya memiliki kemampuan untuk untuk terhindar dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan Indeks Ketahanan Keluarga 78,67.

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kegiatan tersebut dengan melakukan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba terhadap 10 orang keluarga (20 orang) pada setiap wilayah BNNP dan BNNKab/Kota serta melakukan pengisian kuisioner Dektara.

Tabel 5.
Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Lingkungan BNNP Sumatera Barat

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP Sumatera Barat	87,500	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Payakumbuh	81,518	Tinggi
3	BNN Kota Sawahlunto	76,518	Rendah
4	BNN Kabupaten Solok	90,089	Sangat Tinggi
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	74,286	Rendah

Dari table diatas diketahui bahwa perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diampel sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Hasil angka perhitungan Dektara Tahun 2021 adalah 81,430 (Kategori Tinggi)

dengan target angka 78, 67 (Kategori Tinggi). Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut:

- 1). Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,0)
- 2). Kategori tinggi (76, 61 – 88,30)
- 3). Kategori rendah (65, 00 – 76, 60)

Dalam pelaksanaan kegiatan hambatan/kendala yang dihadapi adalah: indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja ini tidak dijelaskan secara terperinci pada awal penginputan sehingga hasil pengisian tidak transparan serta hasil kuesioner dalam aplikasi The Statistic tidak bisa dilihat secara langsung (real time). Hal ini mengakibatkan keluarga pada lokus kegiatan kami kesulitan untuk mengetahui indikator mana saja yang terlewatkan dalam pengisian, dan indikator apa saja yang menjadi dasar dalam penilaian sehingga responden mengetahui kekurangan dari pengisian kuesioner yang telah diisi.

Adapun faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Dapat melakukan intervensi terhadap keluarga dengan baik.
2. Partisipasi Pemerintah Daerah Menganangkan 21 Kelurahan Bersinar di Payakumbuh
3. Tingginya antusias Keluarga untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba di Lingkungannya

Sedangkan faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya”

1. Indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja tidak dijelaskan secara terperinci pada awal penginputan sehingga hasil pengisian tidak transparan dan tidak real time.
2. Kurangnya kepedulian keluarga di kab/kota.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahguna narkoba (DEKTARA) adalah :

1. perlu adanya buku panduan pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga
2. berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan Nagari setempat.

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2021 dalam upaya meningkatkan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya:

1. Pencanaan 21 Kelurahan Bersinar di Kota Payakumbuh;
2. Melakukan Informasi Edukasi keliling melalui mobil sosialisasi;
3. Kegiatan dilaksanakan di Kawasan wisata;
4. Materi dalam kegiatan tersebut tersedia dalam bentuk hardcopy yang dibagikan kepada peserta saat pertemuan terakhir dan bisa diakses oleh peserta melalui link/bit.ly yang disediakan.

3.	Sasaran : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “ Mandiri “ di wilayah Provinsi	4 Kabupaten /kota	4 Kabupaten /kota	100

Program pemberdayaan anti narkoba pada 2021 melalui indikator kinerja ‘Indeks Kemandirian Partisipasi’ (IKP) sedangkan untuk BNNKab/Kota berfokus pada pembentukan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergitas dengan target menjadikan lembaga/institusi/lingkungan masyarakat aktif, mandiri, sukarela dan berkelanjutan mensosialisasikan program P4GN serta terbentuknya penggiat anti narkoba.

Kegiatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN berupa rapat kerja, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat berupa workshop dan bimbingan teknis anti narkoba. Dalam mencapai target dilakukan dengan pengisian kuisioner IKP dari perhitungan nilai IKP terhadap lingkungan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pendidikan di Kab / Kota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan P4GN yang berupa adanya rapat kerja, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, workshop . bimbingan teknis anti narkoba. Perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$IKP = \frac{\text{Hasil penghitungan kuisioner}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}}$$

Tabel 6.
Rekapitulasi Kemandirian Partisipasi di Lingkungan BNNP Sumatera Barat

NO	LINGKUNGAN	SATKER				
		BNNP SUMBAR	BNNK PAYAKUMBUH	BNNK SAWALUNTO	BNNK SOLOK	BNNK PASAMAN BARAT
1	PEMERINTAH	2,78 Mandiri	3,19 Mandiri	3,6 Mandiri	3,76 Sangat Mandiri	3,1 Mandiri
2	DUNIA USAHA	2,73 Mandiri	3,10 Mandiri	3,2 Mandiri	2,29 Kurang Mandiri	3 Mandiri
3	MASYARAKAT	2,89 Mandiri	3,19 Mandiri	4 Mandiri	3,33 Sangat Mandiri	2,38 Kurang Mandiri
4	PENDIDIKAN	2,76 Mandiri	3,20 Mandiri	3,83 Mandiri	3 Mandiri	2,52 Mandiri
TOTAL		11,16	12,68	14,63	12,38	11
RATA – RATA		2,79 Mandiri	3,17 Mandiri	3,66 Mandiri	3,1 Mandiri	2,75 Mandiri

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “ Mandiri “ tercapai oleh 4 kabupaten /kota.

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: terbentuknya penggiat anti narkoba yang berkerja secara suka rela.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan institusi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, diantaranya:

1. Memaksimalkan peran serta para penggiat anti narkoba guna mendukung program P4GN;
2. Meningkatkan pengetahuan penggiat anti narkoba decara berkala dan berkesinambungan;
3. Memantau dan melakukan pendekatan agar stakeholder terkait melaksanakan program P4GN di lingkungan masing – masing.

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2021 yaitu telah dilaksanakan penandatanganan MOU dengan TP-PKK KOTA PARIAMAN, PT. Semen

Padang, PT Elnusa Petrofin TBBK Teluk Kabung, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat serta pembuatan buku saku penggiat anti narkoba.

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada”	2 kawasan	2 kawasan	100
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,52	2,52	100

Kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif merupakan kawasan / wilayah yang memiliki kategori “**bahaya**”. Upaya untuk memulihkan kawasan/ wilayah rawan Narkoba dapat memaksimalkan potensi pada kawasan tersebut dengan arah yang positif melalui rapat kerja, audiensi, bimbingan teknis stakeholder dan pendampingan dalam rencana aksi, pelatihan lifeskill, dan pembinaan masyarakat anti narkoba.

Dalam melakukan pemberdayaan alternatif pada kawasan/wilayah rawan terlebih dahulu dilakukan pemetaan , agar kegiatan pembinaan yang akan diberikan tepat sasaran khususnya di Kelurahan Rawang Kec. Padang Selatan dan Kel. Tanjung Aur Nan XX Kec. Lubuk Begalung. Selanjutnya dilakukan pengisian kuisioner IKKR , kuisioner SKM, dan kuisioner program dan kegiatan kewirausahaan.

Tabel 7.
Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang diintervensi
Program Pemberdayaan Alternatif

No	Nama Kawasan/Wilayah	Jumlah yang dibina	Jenis Life Skill	Stakeholder yang terlibat	Bentuk Keterlibatan
1	Masyarakat Kawasan Kelurahan Rawang Kec. Padang Barat	8 orang	Budidaya Pembesaran Ikan Lele Kolam Terpal	PT. Japfa	Donatur
2	Masyarakat Kawasan Kelurahan Tanjung Aur Nan XX Kec. Lubuk Begalung	7 orang			

Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan *life skill* Budidaya Pembesaran Ikan Lele Kolam Terpal. Kegiatan diikuti oleh 15 (lima belas) orang peserta yang terdiri dari mantan pecandu dan karang taruna. Adapun kelompok kelurahan rawang terdiri dari 8 (delapan) orang (4 orang mantan pecandu dan 4 orang karang taruna). Sedangkan kelompok Kelurahan Tanjung Aur Nan XX terdiri dari 7 (tujuh) orang (3 orang mantan pecandu dan 4 orang karang taruna).

Pelatihan *life skill* ini terwujud karena adanya dukungan dari stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba, mandiri dan produktif.

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Terciptanya Kawasan bebas narkoba yang bersinergi dengan pencaangan Desa Bersinar dan pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Dalam pencapaian indikator kinerja juga terdapat kendala yaitu kurangnya motivasi dan kepedulian stakeholder di kawasan atau wilayah bahaya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam meningkatkan jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif diantaranya:

1. Perlunya dukungan pemerintah setempat
2. Perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan pelatihan *life skill* yang telah diberikan secara berkesinambungan.

Sedangkan untuk nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 2 kawasan berkategori 2,52 (siaga) dihitung dengan cara :

$$\text{Nilai IKKR} = \frac{\text{Total Jumlah Responden}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelurahan Rawang berkategori **BAHAYA** beralih status keterpuliannya menjadi **SIAGA** dengan **IKKR 2,52**
- b. Kelurahan Tanjung Aur Nan XX kategori **BAHAYA** beralih status keterpuliannya menjadi **SIAGA** dengan **IKKR 2,57**.

5.	Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	28 orang	33 orang	118

Definisi operasional dari jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih merupakan pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada agen pemulihan sebagai petugas layanan Intervensi Berbasis Masyarakat. Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud adalah perorangan yang dilatih dan diberikan pembekalan teknis oleh BNN agar mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi kategori resiko rendah sesuai dengan Juknis IBM di masing-masing lokasi.

Pada indikator kinerja jumlah petugas penyelenggaraan IBM merupakan jumlah petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis oleh BNNP dan BNNKab/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.
Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota

No	Satker	Nama Agen Pemulihan	Lokasi
1	BNNP Sumatera Barat	Yosrizal	Kelurahan Rawang , Kelurahan Gunung Pangilun, Kelurahan Berok Nipah, dan Nagari Sungai
		Arif Wahyu N	
		Sherly	
		Didit Setiawan	
		Yendri Nasution	
		Fauzan	
		Daniel Khamaco	
		Fuji Agusri	
2	BNN Kota Payakumbuh	Dedi Hendri	Kelurahan Nunang Daya Bangun
		Fahman Rizal	
		Toto Harianto	
		Wahyudi Indrastira	
		Purwanti	
		Gustami	
		Idrianto	
		Afrizone	
		Devania Adnan	
		Herizal Putra	
3	BNN Kota Sawahlunto	Idwarman	Desa Kolok Nan Tuo, Desa Sikalang, Desa Lunto Timur, Kelurahan Saringan, Kelurahan Tanah Lapang
		Joy Putrawan	
		Rahma Dona Fiska	
		Asri Yozi, St	
		Ronny Wibowo	
4	BNN Kabupaten Solok	Syafri. K	Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
		Erdianis	
		Zarmaneli	
		Noviyanti Ir	
		Khairi Amir	Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Asdal	
		Rahmad Hidayatullah	
		Hifni Nst	
		Adisman	
		Sri Haryani	

Selama tahun 2021 tercatat sebanyak **92 orang klien** yang di fasilitasi oleh Agen Pemulihan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yaitu

1. Background (Profesi) dari masing-masing AP dan komitmen dari masyarakat atau pemerintah setempat dalam mendukung aktivitas IBM.

Sedangkan Faktor kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah :

1. Petugas IBM yang dilatih ada yang kurang aktif
2. Agen Pemulihan sebagai Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang wajib berasal dari Desa/ Kelurahan yang sama, menjadi kendala bagi Kota Kecil seperti khususnya di Sawahlunto.
3. Kurangnya pemahaman AP dalam pelaksanaan layanan IBM sehingga perlu dilakukan pendampingan dari petugas BNNP/ BNNKab/Kota.

Adapun yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Kesibukan Petugas IBM dengan pekerjaan utamanya sehingga tidak bisa menyesuaikan waktu dengan klien.
2. Tingkat kerawanan yang cukup tinggi di lokasi;
3. Sosio budaya masyarakat yang masih menganggap permasalahan narkoba sebagai aib.
4. Jarak lokasi IBM yang jauh dari lokasi kantor BNNK khususnya di Pasaman Barat.
5. Pandemi COVID-19 yang terjadi mengakibatkan penurunan pemanfaatan layanan rehabilitasi.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi kendala diantaranya :

1. Tetap memotivasi agen pemulihan agar pelaksanaan kegiatan IBM dapat berjalan sesuai dengan harapan;
2. berkoordinasi dengan aparatatur Pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan IBM.

Inovasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

1. Adanya dukungan anggaran dari nagari Sungai Buluah Selatan untuk melaksanakan kegiatan P4GN;
2. Adanya dukungan dari PT. Bintang Toedjo dalam pembinaan budi daya jahe merah bagi penyalahguna dan atau pecandu narkoba serta masyarakat di Kelurahan Rawang agar dapat hidup pulih, produktif dan

berfungsi sosial dan terhindar dari segala bentuk Tindakan penyalahguna narkotika.

3. Terlaksananya agen pemulihan 1 (satu) orang per desa/kelurahan di Kota Sawahlunto.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 orang	12 orang	240

Definisi operasional dari Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertiifikasi kompetensi teknis merupakan jumlah petugas rehabilitasi yang sudah memenuhi standar kompetensi dalam melakukan penerimaan awal, skrinning, asesmen, membuat rencana terapi , intervensi, melakukan intervensi dan rujukan pada professional lainnya.

Pada indikator ini , petugas rehabilitasi yang memenuhi syarat nantinya akan mengikuti Uji Sertifikasi. Peserta yang lulus dari pelaksanaan uji sertifikasi adalah 12 orang dari 15 peserta. Berkas dari peserta yang lulus saat ini akan mengikuti sidang pleno dan menjadi penentuan untuk akhir kelulusan dan mendapatkan sertifikat dari LSP BNN sebagai konselor terakreditasi.

Faktor keberhasilan dari indikator ini petugas rehabiltiasi telah mengikuti palatihan UTC 5. Sedangkan untuk faktor kegagalannya terlihat dari kesiapan petugas secara fisik dan mental dalam mengikuti uji sertifikasi.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini adalah adanya arahan dan juknis dari pelaksanaan ini serta kesiapan diri peserta dalam memahami materi uji tersebut. Adapun jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebagai berikut :

Tabel 9.
Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis

NO	NAMA	INSTANSI	KET
1	2	3	4
1	Atika Yosefha	BNNK Solok	LULUS
2	Irwan Suhandra	BNNK Solok	LULUS
3	M. Yunus Putra	BNNK Solok	LULUS
4	Isfan Noviardi	IPWL Al-Ikhwan Suci Hati	LULUS
5	Eka Pratama Putra	Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang	LULUS
6	Sandreza	BNNP Sumbar	LULUS
7	Barta Kurnia	BNNK Payakumbuh	LULUS
8	Dewi Rosa Rianti	BNNK Pasaman Barat	LULUS
9	Imam Sujuddi	Karunia Insani Cab. Sumbar	LULUS
10	Septia Dwi Safrani	BNNP Sumbar	LULUS
11	Rillah Fitrah	IPWL Karunia Insani cabang Sumbar	LULUS
12	Mailisafitri	BNNP Sumbar	LULUS
13	Yogie Kurnia	BNNK Pasaman Barat	TIDAK LULUS
14	Awaludin	BNNK Pasaman Barat	TIDAK LULUS
15	Hendra Amwara	Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang	TIDAK LULUS

6.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	8 Unit	8 Unit	100

Definisi operasional dari Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi adalah layanan rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional.

Target BNNP Sumatera Barat dan jajarannya pada indikator Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi sebanyak 8 Unit, antara lain :

Tabel 10.
Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
di Provinsi Sumatera Barat

No	Satker	Lokasi IBM	Target Klien (Orang)	Realisasi Klien (Orang)
1	BNN Provinsi Sumatera Barat	Kelurahan Rawang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang	8	7
		Kelurahan Berok Nipah, Kec. Padang Barat, Kota Padang	8	7
		Kelurahan Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang	8	9
		Nagari Sungai Buluah Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. PadangPariaman	8	4
2	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Nunang Daya Bangun Kota Payakumbuh	20	5
3	BNN Kota Sawahlunto	Kecamatan Talawi, Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto	20	20
4	BNN Kabupaten Solok	Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok	20	20
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Nagari Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat	20	20
TOTAL			112	92

Dalam upaya pelaksanaan layanan intervensi masyarakat BNNP Sumatera Barat dan jajarannya memiliki target 8 unit / lokasi dan jumlah klien sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) orang. Intervensi Berbasis Masyarakat

(IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (low threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyarikat untuk terlibat didalamnya.

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat adanya dukungan dari Lurah/ Wali Nagari/ Camat serta komponen masyarakat dalam pembentukan lokasi unit dalam pelaksanaan program IBM.

Sedangkan Faktor kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan tidak tercapainya jumlah klien karena domisili klien yang berpindah saat pelaksanaan program serta ketakutan akan stigma bagi pecandu/penyalahguna narkoba.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Sinkronisasi jadwal kegiatan antara agen pemulihan (AP) dengan klien dan petugas BNNP dan BNNKab/Kota;
2. Jarak lokasi penyelenggaraan kegiatan IBM yang cukup jauh;
3. Adanya wabah covid-19 sehingga unit setempat mengambil kebijakan untuk membatasi aktifitas kegiatan tatap muka.

Langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan adalah : Memotivasi agen pemulihan untuk tetap mendampingi klien, serta berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan IBM.

Adanya inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2021 adalah dilakukan pendampingan via daring dan suatu jika melakukan kegiatan tatap muka dilaksanakan dengan standar prosedur kesehatan.

7.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat	3,2	3,2	100

Pelaksanaan kajian penerima layanan rehabilitasi ini dilaksanakan pada tanggal Juli - September 2021 dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat. Proses pengumpulan data dilaksanakan serentak di seluruh klinik pratama BNNP dan BNNK se Indonesia, dan di akomodir oleh Direktorat Pascarehab BNN bersama konsultan penelitian. Setelah data terkumpul, pihak Dir. Pasca dan Konsultan melaksanakan *cleaning* data sebelum dilanjutkan ke tahap analisis data.

Tabel 11.
Hasil Survey Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya

No	Satker	IKM	Kategori
1	BNNP Sumbar	80	Baik
2	BNN Kota Payakumbuh	79,1	Baik
3	BNN Kota Sawahlunto	82	Baik
4	BNN Kabupaten Solok	75,9	Baik
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	87,5	Baik
	TOTAL	79,8	Baik

Secara keseluruhan nilai dari Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat bernilai **Baik** dengan scoring 79,8 (untuk skala 100).

Evaluasi indikator kinerja dilihat dari penilaian berdasarkan pengisian survei kepuasan layanan terhadap klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat adalah : pelaksanaan

rehabilitasi tidak dipungut biaya , pelaksanaan layanan rehabilitasi dilaksanakan sesuai prosedur.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
2. Tingginya angka DO dari klien karena komitmen klien kurang.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan SDM yang ada seperti konselor dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

8.	Sasaran : Meningkatkan Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta jaringan	2 peta jaringan	200

Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan BNNP Sumatera Barat pada tahun 2021 sebanyak 2 jaringan. Adapun jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan diantaranya:

1. Jaringan A
2. Jaringan BB

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan adalah 1 jaringan dan realisasi 2 jaringan, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya: Melakukan kegiatan pemetaan kerjasama dengan informan serta melakukan pengembangan jaringan melalui tapping.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Terbatasnya anggarannya untuk pelaksanaan intelijen
2. Sarana dan prasarana yang terbatas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Kemampuan analis yang masih minim dan perlu ditingkatkan.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen BNN dan berkomunikasi antar analis di BNN
2. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan personil intelijen.

Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2021 yaitu :Melakukan kontrol di beberapa tempat hiburan dan diperbatasan wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan kegiatan Razia narkoba dan berkoordinasi dengan stakeholder.

9.	Sasaran : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	17	29	171

Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P.21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan metode pengukuran berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P.21.

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P.21 adalah 17 berkas perkara dan realisasi 29 berkas perkara, sehingga capaian kinerjanya adalah 171 %. Dan masih

terdapat 11 berkas perkara yang dalam proses P.21 pada BNNP Sumbar dan BNNKab/Kota.

Adapun faktor keberhasilan capaian tersebut diantaranya: kerjasama dengan personil yang berkomitmen memberantas peredaran gelap narkoba.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui pelatihan penyidik, pelatihan analisis wiretapping
2. Terdapat berkas perkara yang masih dalam proses P21 sebanyak :
11 Berkas BNNP Sumbar dan BNNKab/Kota

10.	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	100
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100

Tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah Kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan seperti halnya tidak ada tahanan kabur, cedera serius bahkan yang menyebabkan kematian.

Tabel 12.
Jumlah Tahanan Masuk dan Tahanan Keluar pada Proses Penyidikan TA 2021

BNNP/BNNK	Laporan Kasus	Tahanan Masuk	Tahanan Keluar	Keterangan Kesehatan
BNNP Sumbar	LKN 01	1 Tahanan	1 Tahanan	sehat
	LKN 02	1 Tahanan	1 Tahanan	sehat
	LKN 03	1 Tahanan	1 Tahanan	sehat
	LKN 04	1 Tahanan	1 Tahanan	sehat
	LKN 05	1 Tahanan	1 Tahanan	sehat

	LKN 06	2 tahanan	2 Tahanan	Sehat
	LKN 07	1 Tahanan	1 Tahanan	sehat
	LKN 08	2 tahanan	2 Tahanan	Sehat
	LKN 09	3 tahanan	3 Tahanan	Sehat
	LKN 10	2 tahanan	2 Tahanan	Sehat
	LKN 11	3 tahanan	3 Tahanan	Sehat
	LKN 12	2 tahanan	2 Tahanan	Sehat
BNNK Payakumbuh	LKN 01	1 Tahanan	1 Tahanan	Sehat
	LKN 02	2 Tahanan	2 Tahanan	Sehat
	LKN 03	1 Tahanan	1 Tahanan	Sehat
	LKN 04	1 Tahanan	1 Tahanan	Sehat
	LKN 05	1 Tahanan	1 Tahanan	Sehat
	LKN 06	1 Tahanan	1 Tahanan	Sehat
	LKN 07	1 Tahanan	1 Tahanan	Sehat
	LKN 08	2 Tahanan	2 Tahanan	Sehat
BNNK Sawahlunto	LKN 01	1 tahanan	1 tahanan	Sehat
	LKN 02	1 tahanan	1 tahanan	Sehat
	LKN 03	1 tahanan	1 tahanan	Sehat
	LKN 04	1 tahanan	-	Proses Penyidikan
BNNK Solok	LKN 01	1 tahanan	1 tahanan	Sehat
	LKN 02	1 tahanan	1 tahanan	Sehat
BNNK Pasaman Barat	LKN 01	1 tahanan	1 tahanan	Sehat
	LKN 02	1 tahanan	1 tahanan	Sehat
	LKN 03	3 tahanan	3 tahanan	Sehat
	LKN 04	4 tahanan	-	Proses Penyidikan
JUMLAH		45 Tahanan	40 Tahanan	

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah tahanan yang masuk berbeda dengan jumlah tahanan yang keluar, dikarenakan beberapa kasus masih dalam proses sidik dan proses tahap I yang masih berlanjut pada tahun 2022. Namun dalam hal ini, tahanan dalam keadaan sehat tanpa ada cedera yang serius, sehingga capaian untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah 100%.

Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkoba dan narkoba. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non narkoba pada saat diterima dari

penyidik dengan waktu dikeluarkannya untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Tabel 13.
Jumlah Barang Bukti Narkotika pada Proses Penyidikan 2021

No	Satker	Barang Bukti Narkotika	Barang Bukti Masuk	Barang Bukti yang dimusnahkan & Penyisihan untuk Kepentingan Penyidikan		
				Labor	Pembuktian	Pemusnahan
1	BNNP Sumatera Barat	Shabu	160,08 gr	0,32 gr	159,76 gr	-
		Ganja	319,442,80 gr	19,11 gr	278.460,41 gr	40.963,28 gr
		Extacy	-	-	-	-
2	BNNK Payakumbuh	Shabu	5,9 gr	0,14 gr	5,76 gr	
		Ganja	30.996,64 gr	1,5 gr	30.995, 14 gr	
3	BNNK Sawahlunto	Shabu	1,39 gr	0,09 gr	1,3 gr	-
		Ganja	-	-	-	-
4	BNNK Solok	Shabu	0,8 gr	0,02 gr	0,78 gr	-
		Ganja	-	-	-	-
5	BNNK Pasaman Barat	Shabu	9,45 gr	0,04 gr	9,41 gr	
		Ganja	48.467,94 gr	0,5 gr	23.000 gr	25.467,54 gr
		Ekstasi	5 Butir	1 Butir	4 Butir	
Jumlah			399.085 gr	399.085 gr		

Tabel 14.
Jumlah Barang Bukti Non Narkotika pada Proses Penyidikan 2021

No	Barang Bukti Non Narkotika	Keterangan
	BNNP Sumbar	
1	Uang Tunai sejumlah Rp 1.950.000,-	SITA
2	1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza BA 1345 LM beserta STNK dan Kunci	SITA
3	1 (satu) Unit mobil merk Avanza B 1417 UIV beserta kunci dan STNK	SITA
4	1 (satu) Unit Toyota Rush BB 1474 FQ warna merah	SITA
5	1 (satu) Unit Toyota Avanza BA 1256 SA warna silver	SITA
6	1 (satu) Unit Yamaha Mio Soul warna maron BA 3986 EP	SITA
7	1 (satu) Unit HP Android OPPO	SITA

8	1 (satu) Unit HP Merk Vivo	SITA
9	1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi warna hitam	SITA
10	1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna hitam	SITA
11	1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi warna hitam	SITA
12	1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam	SITA
13	1 (satu) Unit HP Android OPPO warna hitam	SITA
14	1 (satu) Unit HP Merk Vivo 904 warna biru	SITA
15	1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna hitam	SITA
16	1 (satu) Unit HP Merk Samsung A72 warna hitam	SITA
BNNK Payakumbuh		
17	1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat tanpa nopol beserta kunci kontak	SITA
18	1 (satu) unit Bong	SITA
19	1 (satu) unit kotak jam tangan merk SKMEI warna hitam	SITA
20	8 (delapan) lembar plastic klep warna kuning	SITA
21	1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam	SITA
22	Uang tunai sejumlah Rp. 300.000	SITA
23	1 (satu) unit HP merk Mito warna merah	SITA
24	1 (satu) unit Sepeda motor merk Beat warna putih tanpa nopol beserta kunci kontak dan STNK	SITA
25	1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna coklat	SITA

26	1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold	SITA
27	1 (satu) helai baju warna hitam merk krg_sco	SITA
28	1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam kombinasi merah tanpa nopol beserta kunci kontak	SITA
29	1 (satu) helai celana jeans merk Hugo body warna dongker	SITA
30	1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk GNEI FASHION	SITA
31	1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver kombinasi biru	SITA
32	1 (satu) unit HP merk samsung warna putih	SITA
33	1 (satu) helai celana jenis katun warna coklat	SITA
34	1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold	SITA
35	1 (satu) unit Sepeda merk SCOTT warna biru	SITA
36	1 (satu) helai celana pendek merk 501 warna biru	SITA
37	1 (satu) unit mobil merk Avanza warna putih Nopol B 1418 ZFU beserta kunci kontak dan STNK	SITA
38	1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna cream	SITA
39	1 (satu) unit HP merk Vivo tipe 2027 warna biru	SITA
BNNK Sawahlunto		
40	1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna merah	SITA
41	1 (satu) helai jaket warna biru	SITA
42	1 (satu) unit celana jeans warna biru	SITA
43	1 (satu) buah HP merek Samsung Warna Silver	SITA
44	1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo warna hitam	SITA
45	1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam	SITA
46	1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam	SITA
47	Uang tunai sebesar Rp. 5.338.000 (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)	SITA
48	1 (satu) unit HP merek Vivo warna Hitam	SITA
49	1 (satu) helai celana Pendek warna Coklat	SITA

50	1 (satu) buah dompet warna Coklat	SITA
51	1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam	SITA
52	1 (satu) buah Kotak Rokok Merek ESSE	SITA
53	1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Putih Ungu	SITA
BNNK Solok		
54	1 (satu) unit Motor merk Vario 125 warna Merah Nomor Polisi BA 5093 PA.	SITA
55	1 (satu) buah rangkaian alat shabu	SITA
56	1 (satu) buah kotak rokok coffee stik berwarna putih	SITA
57	1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Oxygen.	SITA
58	1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (Bong)	SITA
59	1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Tipe 1904 warna Biru	SITA
60	1 (satu) Unit Motor Merk Honda PCX warna putih tanpa Nomor Polisi.	SITA
BNNK Pasaman Barat		
61	1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam	SITA
62	1 (satu) lembar bukti transfer BRI	SITA
63	1 (satu) unit handphone Samsung GT E-1272 warna Putih	SITA
64	1 (satu) Unit Handphone merek samsung lipat GT-E1272 warna hitam	SITA
65	1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1904 warna biru	SITA
66	1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merek Jingpin.	SITA
67	1 (satu) buah dompet merek Levis warna cokelat.	SITA
68	1 (satu) helai celana Jeans merek Oxygen warna biru dongker.	SITA
69	1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna merah BA 1099 SD.	SITA
70	1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari kaca	SITA
71	1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ukuran kecil	SITA
72	1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ukuran sedang	SITA
73	2 (dua) buah kaca pirek yang berbentuk cembung	SITA

74	2 (dua) buah kaca pirek bekas pakai yang didalamnya masih terdapat sisa sabu	SITA
73	Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	SITA
75	Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	SITA
76	1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merek Toyota Rush warna merah Plat Nomor BB 1474 FQ	SITA
77	1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merek Toyota Avanza warna Silver Plat Nomor BA 1526 SA	SITA
78	1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 berwarna Biru dengan nomor Imei : 862645042411818; 862645042411800	SITA
79	1 (satu) buah tas warna abu-abu merek TANMESO	SITA
80	1 (satu) buku rekening Tabungan Simpedes BRI atas nama SOFYAN HIDAYAT dengan nomor rekening : 5335-01-015868-53-6	SITA
81	1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI dengan nomor seri 6013-0120-9782-5204	SITA
82	1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A72 warna hitam	SITA

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang diterima dari penyidik dengan yang dikeluarkan (dimusnahkan dan penyisihan) untuk kepentingan penyidikan adalah sama.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian target yaitu adanya kerjasama dengan stakeholder terkait. Namun permasalahan dalam pencapaian target saat ini belum adanya tempat penyimpanan yang memenuhi standar

Dalam mengatasi permasalahan tersebut langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan yaitu peningkatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk menjaga keamanan barang bukti.

11.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat	92	87, 25	95
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 kabupaten/kota	0 kabupaten/kota	0

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian yang diperoleh dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Tabel 15.
Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2021

No	BNNP/BNNK	Nilai Kinerja Anggaran (Capaian Aplikasi Smart Kemenkeu per 31 Des 2021)
1	BNNP Sumbar	87,25
2	BNN Kota Payakumbuh	87,12
3	BNN Kota Sawahlunto	86,94
4	BNN Kabupaten Solok	78,06
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	89,04

Penilaian nilai kinerja pada aplikasi Smartkemenkeu BNNP terdiri dari :

1. Capaian RO : 43, 5 %
2. Efisiensi : 28,6 %
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan : 18,2 %
4. Penyerapan anggaran : 9,7 %

Dari penghitungan tabel diatas maka capaian akhir nilai kinerja anggaran BNNP Sumatera Barat adalah:

$$\text{Capaian Akhir} = \frac{\text{Total Nilai Kinerja Anggaran BNNP dan BNNK}}{\text{Jumlah BNNP dan BNNK}}$$

$$= \frac{87,25 + 87,12 + 86,94 + 78,06 + 89,4}{5}$$

$$= 85,68$$

Dari hasil hitung diatas maka nilai kinerja anggaran BNNP Sumatera Barat adalah 85,68.

Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya nilai kinerja pada BNNP Sumatera Barat dan BNNKab/Kota adalah belum memahami sepenuhnya penilaian indikator efisiensi pada Aplikasi Smartkemenkeu serta optimalisasi anggaran sehingga beberapa anggaran dari kegiatan dialihkan untuk realokasi COVID-19.

Dapat disimpulkan pada indikator Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target pada BNNP Sumatera Barat tidak tercapai untuk tahun 2021 ini.

12.	Sasaran : Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
------------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat	94	97,91	104
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 kabupaten/kota	3 kabupaten/kota	75

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 adalah 97,91 dengan target 94. Nilai Indikator Kinerja tersebut diperoleh dari Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN). Maka capaian target IKPA BNN Provinsi Sumatera Barat adalah 104 %.

Sedangkan untuk jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target sebanyak 3 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16.
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat dan BNNKab/kota Tahun 2021

No	BNNP/BNNK	Nilai IKPA (Capaian Aplikasi Smart Kemenkeu per 31 Des 2021)
1	BNNP Sumbar	97,91
2	BNN Kota Payakumbuh	98,54
3	BNN Kota Sawahlunto	97,78
4	BNN Kabupaten Solok	97,42
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	86,35

Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi, pembinaan teknis dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan P4GN.
- b. Peningkatan kualitas SDM baik struktural maupun fungsional melalui pelatihan/diklat.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.449.818.000,- pada tahun 2021 yang berasal dari dana APBN.

Tabel 17.
Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2021

NO.	JENIS BELANJA	PAGU PER JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2021	SISA ANGGARAN
1.	Belanja Pegawai	3.255.630.000	3.231.466.759	24.163.241
2.	Belanja Barang	11.111.828.000	10.836.331.705	275.496.295
3.	Belanja Modal	82.360.000	64.678.000	17.682.000
TOTAL		14.449.818.000	14.132.476.464	317.341.536

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi anggaran BNNP Sumatera Barat tahun 2021 guna mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah adalah sebesar Rp.14.132.476.464,- atau sebesar 97,80 % dari total anggaran.

Jika dilihat dari sumber dana alokasi anggaran BNNP Sumatera Barat Tahun 2021 adalah :

Tabel 18.
Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2021 Berdasarkan Sumber Dana

NO.	SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020	SISA ANGGARAN
1.	APBN	14.449.818.000	14.132.476.464	317.341.536

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan dengan harapan dapat berperan sebagai alat kendalai guna mengetahui kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Sumatera Barat telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2021.

Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2021 merupakan sinergitas kinerja dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan serta Bagian Umum yang berpengaruh terhadap capaian keberhasilan tugas BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks di Bidang P4GN.

- a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi , target 3 kab/kota tercapai 3 kab/kota;
 - Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 2 kab/kota;
 - Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota;
 - Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada”, target 2 kawasan tercapai 2 kawasan;
 - Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi, target 2,52 tercapai.

- b. Bidang Rehabilitasi terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, target 28 orang tercapai 33 orang;
 - Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, target 5 orang tercapai 12 orang;
 - Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 8 Unit tercapai 8 Unit;
 - Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat, target 3,2 tercapai 3,2.
- c. Bidang Pemberantasan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan, target 1 jaringan tercapai 2 jaringan.
 - Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 target 17 berkas perkara tercapai 29 berkas perkara.
 - Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, target 100 tercapai 100.
 - Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba, target 100 tercapai 100.
- d. Bagian Umum terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat , target 92 tercapai 87,25;
 - Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, target 4 kabupaten/kota , dengan hasil tidak tercapai dikarenakan belum memahami sepenuhnya penilaian indikator efisiensi pada Aplikasi Smartkemenkeu;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat target 94 tercapai 97,21;
 - Jumlah BNN Kabupaten /Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target, target 4 kabupaten/kota tercapai 3 kabupaten/kota.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2021 bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, telah dilakukan dengan upaya yang optimal dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di daerah demi terwujudnya **Indonesia menjadi Generasi Emas, Generasi Sehat tanpa Narkoba.**

Padang, 28 Januari 2022
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat



Drs. KHASRIL



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Khasril

Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Petrus R. Golose

Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 24 Maret 2021

Pihak Kedua,

Kepala Badan Narkotika Nasional

Dr. Petrus R. Golose

Pihak Pertama,

Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat

Drs. Khasril

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,52
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	28 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	-

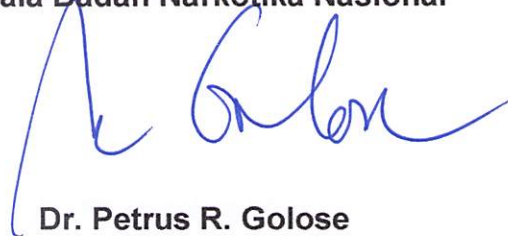
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	8 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-
12	Meningkatnya proses	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat	92

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	590.396.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	285.035.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	1.031.569.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	163.979.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	219.405.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	523.112.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	36.749.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	200.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	1.182.061.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	302.435.000
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp	-

12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	3.927.022.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	119.779.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	137.460.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	5.617.544.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	89.773.000

Pihak Kedua,
Kepala Badan Narkotika Nasional



Dr. Petrus R. Golose

Bogor, 24 Maret 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat



Drs. Khasril



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarminal, S.H., M.Hum
Jabatan : Kepala BNN Kota Payakumbuh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Khasril
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat



Drs. Khasril

Padang, 27 April 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Payakumbuh



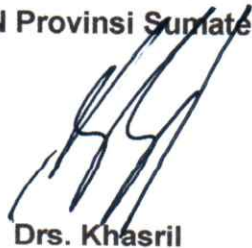
Sarminal, S.H., M.Hum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,00
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Payakumbuh	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Payakumbuh	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Payakumbuh	94

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	135.500.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	64.400.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	179.405.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	-
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	11.423.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	88.950.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	71.052.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	18.875.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	118.890.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	12.800.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	17.540.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	943.600.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	14.100.000

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat



Drs. Khasril

Padang, 27 April 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Payakumbuh



Sarminah, S.H., M.Hum



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlis, S.E., M.H.

Jabatan : Kepala BNN Kota Sawahlunto

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Khasril

Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

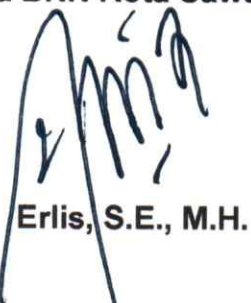
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 27 April 2021

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat


Drs. Khasril

Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Sawahlunto


Erlis, S.E., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN KOTA SAWAHLUNTO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,10
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Sawahlunto	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Sawahlunto	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Sawahlunto	94

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	51.608.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	59.810.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	195.475.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	-
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	10.675.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	61.100.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	71.052.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	15.700.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	136.035.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	19.454.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	30.684.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.017.370.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	17.675.000

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat


Drs. Khasril

Padang, 27 April 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kota Sawahlunto


Erlis, S.E., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saifuddin Anshori, S.I.K
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut pihak pertama

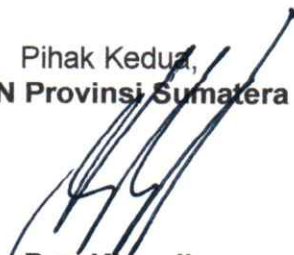
Nama : Drs. Khasril
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat



Drs. Khasril

Padang, 27 April 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kabupaten Solok



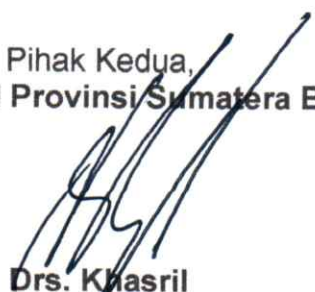
Saifuddin Anshori, S.I.K

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN KABUPATEN SOLOK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,10
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Solok	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Solok	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Solok	94

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	110.050.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	54.700.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	187.425.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	-
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	11.423.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	93.165.000
7.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	71.052.000
8.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	-
9.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	112.136.000
10.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	15.600.000
11.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	18.670.000
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	865.304.000
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	8.700.000

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat


Drs. Khasril

Padang, 27 April 2021
Pihak Pertama,
Kepala BNN Kabupaten Solok


Saifuddin Anshori, S.I.K



PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Effenry Am., SH. , MM.
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Pasaman Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Khasril
Jabatan : Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 27 April 2021

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat

Pihak Pertama,
Kepala BNN Kabupaten Pasaman Barat



Drs. Khasril



Irwan Effenry Am., SH., MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	2,51
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	2 Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Pasaman Barat	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Pasaman Barat	94

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	57.653.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	56.125.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	257.640.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	-
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	11.423.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	99.675.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	71.052.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	19.625.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	122.710.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	1.800.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	30.870.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	761.256.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	4.600.000

Padang, 27 April 2021

Pihak Kedua,
Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat



Drs. Khasril

Pihak Pertama,
Kepala BNN Kabupaten Pasaman Barat



Irwan Effenry Am., SH., MM.